

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunan. Laporan tahunan yang salah satunya terdiri dari laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Laporan keuangan yang disampaikan harus memuat informasi yang wajar (tidak memihak), transparansi (jujur) dan independen atau bebas dari benturan kepentingan.

Menurut Purba (2009) asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*. Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup adalah syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, yaitu dasar pencatatan

transaksi yang dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau diberikan. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai basis pencatatan.

Dalam pengelolaannya, perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), tata kelola perusahaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan/organisasi. Secara bersamaan dalam pengelolaannya, perusahaan juga akan menemui kendala-kendala, seperti sistem pengendalian manajemen yang tidak efektif, keputusan manajemen yang kurang tepat, strategi perusahaan yang diterapkan dan lain sebagainya. Kendala-kendala tersebut dapat menjadi indikasi perusahaan gagal untuk mempertahankan kelangsungannya. Kegagalan perusahaan dapat diukur dengan kesulitan keuangan (*financial distress*) yang terjadi. Kesulitan keuangan yang terjadi dapat dikatakan adalah dampak dari kelemahan dalam tata kelola perusahaan.

Menurut Brigham dan Daves (2003) dalam Fachrudin (2008) *financial difficulties* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen. Sinyal-sinyal potensi kesulitan keuangan biasanya nampak jelas melalui analisa rasio sebelum perusahaan benar-benar gagal.

Tata kelola perusahaan yang baik akan mempengaruhi rentan tidaknya suatu perusahaan terhadap risiko kegagalan. Masalah *good corporate governance* hingga

saat ini masih menjadi isu besar perusahaan-perusahaan modern. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada direksi perusahaan. Hubungan antara pemegang saham dan direksi perusahaan dikenal dengan '*agency relationship*'. Hubungan ini juga ada antara direksi dan karyawan kunci. Kepentingan direksi perusahaan dan pemegang saham tidaklah sama dan sering berbenturan. Jika perusahaan dikelola oleh manajemen dan dimiliki oleh pemegang saham yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka risiko kegagalan perusahaan tersebut akan sedikit. *Good corporate governance* akan tercapai apabila peranan direksi atau pengelola ditingkatkan dan tidak berada di bawah bayang-bayang pemilik perusahaan. Biasanya perusahaan publik atau perusahaan yang tidak dikuasai segelintir pemegang saham mayoritas biasanya lebih kokoh jika dibandingkan dengan perusahaan yang sepenuhnya dikuasai oleh perorangan atau perusahaan keluarga. Adanya pemisahan yang jelas antara pihak pengelola dari pihak pemilik perusahaan dapat menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Berbagai skandal kasus korporasi dunia pada perusahaan berskala besar seperti Enron, Xerox, dan WorldCom, mengindikasikan bahwa kegagalan bisnis perusahaan tersebut akibat tata kelola perusahaan yang buruk. Kasus Enron menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan pribadi direksi dalam perusahaan mengakibatkan pailitnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, masalah *corporate governance* menarik perhatian untuk dikaitkan dengan kesulitan keuangan sejak krisis finansial pada tahun 1997. Banyak para ahli berpendapat kelemahan di dalam *corporate governance* merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya

perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Husnan (2001) dalam Anggarini (2010). Skandal kasus PT Kimia Farma, Bank Lippo dan PT Indofarma merupakan contoh dari lemahnya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, *good corporate governance* menjadi bagian untuk membenahan pengelolaan korporasi.

Pembentukan komite audit, merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menyebutkan bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik maka diperlukan komite audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan independensi dan menyempurnakan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan komite audit peraturan nomor IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru. Keputusan tersebut secara tersirat memberikan atau menegaskan keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Menurut Wathne dan Heide (2000) dalam Elyanto (2013), Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk mengendalikan dan memonitor manajemen. Komite audit berperan penting dalam mengendalikan dan memonitor

operasi serta sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Komite audit yang efektif diharapkan dapat fokus untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi dari manajemen puncak

Anggraini (2010) menyatakan bahwa efektivitas kinerja dari komite audit dapat diukur melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran, independensi, aktivitas dari komite audit, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit. Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan. Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kesulitan keuangan. Oleh karena itu, efektivitas komite audit dikaitkan dengan kemakmuran atau kesulitan keuangan perusahaan.

Beberapa data telah menunjukkan bahwa *consumer goods industry* memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia. Pertumbuhan yang terus-menerus positif tentunya akan menaikkan nilai investasi pada bidang *consumer goods industry*. Tetapi apakah kondisi tersebut dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan terlepas dari kemungkinan *financial distress*.

Uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada *Consumer Good Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memunculkan rumus masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan ?
2. Apakah proporsi anggota komite audit independen berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan ?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan
2. Mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan

3. Mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas komite audit terhadap *financial distress* yang mungkin dihadapi suatu perusahaan. Komite audit yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), hal ini didukung dengan keputusan Bapepam yang merekomendasikan suatu perusahaan untuk membentuk komite audit. Sehingga komite audit dirasa penting dalam pengelolaan suatu entitas perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pembentukan komite audit yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Komite audit berperan dalam pengawasan terhadap mekanisme *good corporate governance* perusahaan.